PERLAWANAN DAN KEKUASAAN BAYANGAN: SULTAN THAHA SAIFUDDIN DAN SULTAN BAYANGAN DALAM RELASI KOLONIAL BELANDA DI JAMBI, 1858–1904

Ilmi Hayyu Dina[1], Abelya Niken Dwi Oktafia[2], Muhammad Haekal Nugroho[3], Khaliisha Nurul Aqila[4], Afta Khusnul Khotimah[5], Fatonah[6], Nirwan II Yasin[7]
ilmyrealme@gmail.com[1], abelyanikendwioktafia02@gmail.com[2], nugrohohekal22@gmail.com[3], kilvayeonic@gmail.com[4], aftakhusnul252@gmail.com[5], fatonah.nurdin@unja.ac.id[6], nirwan87@unja.ac.id[7]
Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Sultan Thaha Saifuddin sebagai simbol perlawanan Kesultanan Jambi terhadap kolonialisme Belanda pada periode 1858–1904 serta fenomena "sultan bayang", yaitu sultan tandingan yang diangkat atau didukung pemerintah Hindia Belanda setelah Sultan Thaha meninggalkan pusat pemerintahan dan melanjutkan perlawanan dari pedalaman. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah naik takhta pada 1855, Sultan Thaha menolak memperbarui perjanjian yang memperkuat campur tangan Belanda di Jambi. Konflik terbuka terjadi pada 1858 dan mendorong Sultan Thaha memindahkan pusat pemerintahannya ke pedalaman. Belanda kemudian mengangkat sultan tandingan, antara lain Sultan Ahmad Nazaruddin, Sultan Muhammad Muhieddin, dan Sultan Ahmad Zainuddin. Keberadaan dua pusat kekuasaan tersebut menunjukkan adanya persaingan antara legitimasi kolonial dan legitimasi yang diperoleh Sultan Thaha dari para pengikutnya. Sultan Thaha gugur pada 27 April 1904, sedangkan Kesultanan Jambi kemudian ditempatkan dalam struktur pemerintahan kolonial dan Keresidenan Jambi dibentuk pada 1906. Kajian ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga berupaya membangun legitimasi politik tandingan untuk melemahkan perlawanan lokal.
Kata Kunci: Sultan Thaha Saifuddin, Sultan Bayang, Kolonialisme Belanda, Kesultanan Jambi.

ABSTRACT

This study examines the position of Sultan Thaha Saifuddin as a symbol of resistance by the Jambi Sultanate against Dutch colonialism during 1858–1904, as well as the phenomenon of "shadow sultans" supported by the Dutch East Indies government after Sultan Thaha left the political center and continued the resistance from the interior. This study employs the historical method, consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings show that after ascending the throne in 1855, Sultan Thaha refused to renew agreements that strengthened Dutch intervention in Jambi. Open conflict occurred in 1858, forcing Sultan Thaha to move his center of government to the interior. The Dutch subsequently supported rival sultans, including Sultan Ahmad Nazaruddin, Sultan Muhammad Muhieddin, and Sultan Ahmad Zainuddin. The coexistence of two centers of authority demonstrates the competition between colonial legitimacy and the legitimacy maintained by Sultan Thaha among his followers. Sultan Thaha died in battle on 27 April 1904, while the Jambi Sultanate was subsequently incorporated into the colonial administrative structure, with the Residency of Jambi established in 1906. This study demonstrates that colonialism relied not only on military force but also on the construction of rival political legitimacy to weaken local resistance.
Keywords: *Sultan Thaha Saifuddin, Shadow Sultan, Dutch Colonialism, Jambi Sultanate.*

PENDAHULUAN

Kesultanan Jambi merupakan salah satu kesultanan Melayu Islam di Sumatra yang sejak abad ke-17 memiliki hubungan perdagangan sekaligus mengalami ketegangan politik dengan Belanda. Posisi Jambi di sepanjang Sungai Batanghari serta kekayaan hasil bumi dan hasil hutan menjadikan wilayah ini penting dalam kepentingan perdagangan kolonial. Sungai menjadi jalur utama yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat kesultanan, sehingga siapa pun yang menguasai jalur tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan politik setempat.

Pada abad ke-19, hubungan antara Kesultanan Jambi dan Belanda berkembang menjadi hubungan yang semakin tidak seimbang. Campur tangan Belanda semakin kuat melalui sejumlah perjanjian politik yang membatasi ruang gerak pemerintahan Kesultanan Jambi. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak hanya mengatur hubungan dagang, tetapi juga membuka jalan bagi pengawasan Belanda terhadap urusan pemerintahan kesultanan.

Ketegangan meningkat pada masa Sultan Thaha Saifuddin, yang naik takhta pada 1855. Sultan Thaha menolak memperbarui perjanjian yang dianggap merugikan kedaulatan Jambi. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya konflik terbuka dengan Belanda pada 1858. Setelah pusat pemerintahan di Tanah Pilih dikuasai Belanda, Sultan Thaha tidak berhenti memerintah, melainkan melanjutkan pemerintahan dan perlawanan dari pedalaman Jambi hingga ia gugur pada 1904.

Belanda kemudian mendukung pengangkatan sultan tandingan untuk mengisi posisi politik di wilayah yang berada dalam pengaruh kolonial. Dalam ingatan sejarah masyarakat Jambi, para sultan tersebut dikenal sebagai “sultan bayang”. Fenomena ini penting dikaji karena memperlihatkan bahwa penguasaan kolonial dilakukan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pembentukan legitimasi politik tandingan. Dengan kata lain, perlawanan Sultan Thaha tidak hanya berlangsung di medan pertempuran, tetapi juga dalam persaingan untuk memperoleh pengakuan sebagai penguasa yang sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas empat hal pokok, yaitu (1) latar belakang awal intervensi kolonial Belanda di Kesultanan Jambi, (2) sikap politik dan perlawanan Sultan Thaha Saifuddin pada 1858–1904, (3) fenomena sultan bayang serta dualisme kekuasaan yang ditimbulkannya, dan (4) akhir perlawanan yang diikuti dengan konsolidasi kekuasaan kolonial di Jambi. Melalui pembahasan tersebut, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa sejarah perlawanan Sultan Thaha perlu dipahami bersama dengan upaya Belanda membangun legitimasi tandingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merekonstruksi rangkaian peristiwa dan hubungan kekuasaan pada masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang tersedia.

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka yang relevan, seperti buku sejarah, artikel jurnal, sumber pemerintah, ensiklopedia, dan sumber daring. Sumber yang digunakan antara lain artikel jurnal tentang perjuangan Sultan Thaha, buku terbitan Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, informasi dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jambi, serta naskah pada Wikisumber. Kritik sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antarsumber, terutama pada bagian yang memiliki perbedaan penamaan, tanggal, atau urutan peristiwa. Perbandingan ini penting karena nama sultan, masa pemerintahan, dan penyebutan tempat tidak selalu ditulis sama dalam setiap sumber.

Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan data untuk memahami hubungan antara Sultan Thaha, sultan tandingan, dan pemerintah kolonial Belanda. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang runtut dan analitis. Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga belum menggunakan arsip primer secara langsung, dan hal tersebut menjadi keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca hasil kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesultanan Jambi dan Awal Intervensi Kolonial Belanda

Hubungan Kesultanan Jambi dengan Belanda berkembang sejak abad ke-17 dan semakin kuat pada abad ke-19. Pada tahap awal, hubungan tersebut terutama berkaitan dengan perdagangan hasil bumi dan hasil hutan yang mengalir melalui Sungai Batanghari. Seiring waktu, kepentingan dagang itu berkembang menjadi kepentingan politik yang menempatkan Kesultanan Jambi dalam posisi yang semakin terikat.

Salah satu tonggak penting terjadi pada 1833 ketika Sultan Muhammad Fakhruddin dipaksa menandatangani Perjanjian Sungai Baung. Perjanjian tersebut memberi Belanda hak untuk menguasai dan melindungi Jambi serta menduduki tempat-tempat yang dianggap strategis. Ketentuan seperti ini membuat kedaulatan kesultanan berkurang karena keputusan penting tidak lagi sepenuhnya berada di tangan sultan. Pada 1835, dibuat pula perjanjian pelengkap yang memperluas campur tangan Belanda dalam perdagangan dan pemerintahan Jambi. Perjanjian-perjanjian tersebut menjadi bagian dari latar belakang meningkatnya ketegangan antara Kesultanan Jambi dan pemerintah kolonial.

Dalam kerangka tersebut, hubungan Jambi dan Belanda pada abad ke-19 tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan dagang. Perjanjian-perjanjian yang dibuat memberi dasar bagi Belanda untuk hadir di wilayah kesultanan dan ikut campur dalam urusan perdagangan serta pemerintahan. Bagi Kesultanan Jambi, keadaan ini menimbulkan persoalan karena kekuasaan sultan mulai dibatasi oleh pihak luar. Keadaan inilah yang menjadi latar bagi sikap Sultan Thaha pada masa berikutnya.

Naik Takhtanya Sultan Thaha Saifuddin dan Sikap Politiknya

Sultan Thaha Saifuddin lahir pada 1816 dan dikenal sebagai sultan Jambi yang terakhir. Sebelum menjadi sultan, ia menjabat sebagai Pangeran Ratu. Ia naik takhta pada 1855, yaitu ketika pengaruh Belanda yang berasal dari perjanjian-perjanjian sebelumnya sudah dirasakan dalam kehidupan politik kesultanan. Sebagai penguasa, ia menolak memperbarui perjanjian dengan Belanda dan mempertahankan kedaulatan Kesultanan Jambi. Sikap tersebut membuat hubungan dengan pemerintah kolonial semakin tegang.

Penolakan Sultan Thaha menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar pergantian penguasa, tetapi juga menyangkut kedudukan politik dan kedaulatan Kesultanan Jambi. Dengan menolak pembaruan perjanjian, Sultan Thaha berusaha menghentikan kelanjutan ikatan yang membatasi kekuasaannya. Bagi pemerintah kolonial, sikap itu dipandang sebagai hambatan terhadap kepentingan mereka di Jambi, sehingga ketegangan yang ada kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.

Menurut naskah pada Wikisumber, Sultan Thaha sejak dinobatkan menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak mengakui kekuasaan Belanda dan tidak bersedia berunding dengan mereka. Naskah yang sama juga menyebut bahwa pada 1851, ketika masih menjabat Pangeran Ratu, ia berhubungan dengan misi dagang Amerika Serikat yang datang ke Jambi untuk bersama-sama mengusir Belanda. Informasi tersebut perlu dibaca dengan hati-hati karena bersumber dari satu naskah, tetapi memberi gambaran bahwa sikap menentang Belanda sudah tampak sebelum ia naik takhta.

Perlawanan Sultan Thaha Saifuddin terhadap Belanda (1858–1904)

Pada 25 September 1858, pasukan Belanda tiba di Muara Kumpeh dan terjadi pertempuran dengan pasukan Sultan Thaha. Setelah pusat pemerintahan di Tanah Pilih dikuasai, Sultan Thaha bersama para pengikutnya mundur ke Muara Tembesi dan kemudian membangun basis pemerintahan di pedalaman. Keputusan ini menunjukkan bahwa kehilangan pusat pemerintahan tidak otomatis mengakhiri kekuasaan Sultan Thaha di mata para pengikutnya.

Dari wilayah pedalaman, ia mempertahankan perlawanan terhadap Belanda selama puluhan tahun. Lamanya perlawanan tersebut memperlihatkan bahwa Sultan Thaha masih memiliki dukungan dan jaringan pengikut meskipun tidak lagi menguasai pusat kesultanan. Perlawanan tersebut berakhir ketika Sultan Thaha gugur pada 27 April 1904 di wilayah Betung Bedarah, Jambi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa para pengikut Sultan Thaha tetap setia kepadanya, sehingga perlawanan berlangsung lama dan Belanda beberapa kali harus menambah kekuatan militernya di Jambi. Atas perjuangannya, Sultan Thaha Saifuddin kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 079/TK/Tahun 1977 pada 10 November 1977.

Sejumlah kajian menyebut bahwa Sultan Thaha berupaya melepaskan ikatan perjanjian dengan Belanda melalui perlawanan fisik maupun jalur diplomatik, dan bahwa perlawanan dari pedalaman banyak dilakukan dengan cara gerilya. Naskah pada Wikisumber juga menyebut bahwa Sultan Thaha berhasil meyakinkan masyarakat bahwa perjuangannya benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini membantu menjelaskan mengapa para pengikutnya dapat bertahan dalam waktu yang lama. Menurut naskah yang sama, penetapan sebagai Pahlawan Nasional berawal dari usulan masyarakat Jambi melalui DPRD Tingkat I dan Badan Pembina Pahlawan Daerah Provinsi Jambi.

Fenomena Sultan Bayang: Sultan Tandingan yang Didukung Belanda

Setelah pusat pemerintahan Sultan Thaha dikuasai pada 1858, Belanda mendukung pengangkatan Panembahan Prabu sebagai Sultan Ahmad Nazaruddin. Ia kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Muhieddin. Setelah itu, Sultan Ahmad Zainuddin menjadi sultan berikutnya dalam struktur kekuasaan yang didukung Belanda. Pergantian beberapa sultan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial berusaha menjaga adanya penguasa yang bersedia bekerja dalam kerangka kepentingan Belanda.

Sumber sejarah Pemerintah Provinsi Jambi mencatat bahwa Sultan Ahmad Zainuddin memerintah pada 1885–1899, kemudian Sultan Thaha kembali tercatat sebagai penguasa aktif pada periode 1900–1904. Naskah pada Wikisumber mencatat masa pemerintahan Sultan Ahmad Zainuddin pada 1886–1899. Perbedaan satu tahun pada awal masa pemerintahannya menunjukkan pentingnya kritik sumber dalam menelaah masa pemerintahan para sultan di Jambi, sedangkan kedua catatan sama-sama menempatkan berakhirnya masa pemerintahannya pada 1899.

Fenomena sultan bayang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah kolonial akan penguasa yang dapat diterima secara formal di wilayah yang berada dalam pengaruhnya. Dengan mengangkat atau mendukung sultan tandingan, Belanda memiliki pihak yang dapat dijadikan mitra dalam urusan pemerintahan, sementara Sultan Thaha berada di pihak yang melawan. Namun, pengakuan formal dari pemerintah kolonial tidak otomatis berarti pengakuan dari masyarakat, sebagaimana tampak pada sikap rakyat Jambi yang tetap setia kepada Sultan Thaha.

Dualisme Kekuasaan: Legitimasi Rakyat dan Legitimasi Kolonial

Pengangkatan sultan tandingan menciptakan dualisme kekuasaan. Di wilayah yang berada dalam pengaruh Belanda, para sultan tandingan menjadi bagian dari struktur

pemerintahan kolonial. Sementara itu, Sultan Thaha mempertahankan pemerintahan dan jaringan pendukungnya dari pedalaman.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi administratif yang dibangun oleh pemerintah kolonial dan legitimasi politik yang dipertahankan Sultan Thaha di antara para pengikutnya. Satu pihak memperoleh kedudukan melalui dukungan kolonial, sedangkan pihak lain memperoleh pengakuan dari kesetiaan para pengikut yang tetap menganggapnya sebagai pemimpin. Sumber yang digunakan juga menyebut bahwa para sultan tandingan tidak diakui oleh rakyat Jambi, yang tetap menganggap Sultan Thaha sebagai sultan mereka. Oleh karena itu, istilah "sultan bayang" dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika perebutan legitimasi dalam konteks kolonial, yaitu ketika kedudukan sultan tandingan dipandang tidak sepenuhnya mandiri karena bergantung pada dukungan Belanda.

Dualisme ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan wilayah dan kekuatan senjata. Pemerintah kolonial menguasai pusat pemerintahan, tetapi tidak sepenuhnya memperoleh kesetiaan masyarakat. Sebaliknya, Sultan Thaha kehilangan pusat pemerintahan, tetapi tetap memiliki pengaruh melalui jaringan pengikut di pedalaman. Karena itu, persaingan kedua pihak berlangsung pada dua tingkat, yaitu persaingan militer dan persaingan memperebutkan pengakuan sebagai penguasa yang sah.

Akhir Perlawanan dan Berakhirnya Kesultanan Jambi

Setelah Sultan Thaha gugur pada 27 April 1904, kekuasaan Belanda di wilayah Jambi semakin terkonsolidasi. Dengan wafatnya pemimpin perlawanan tersebut, pemerintah kolonial tidak lagi menghadapi pusat perlawanan yang sebelumnya bertahan dari pedalaman. Pemerintah kolonial kemudian membentuk Keresidenan Jambi.

Berdasarkan informasi Pemerintah Provinsi Jambi, Residen Jambi pertama, O.L. Helfrich, diangkat melalui keputusan Gubernur Jenderal pada 4 Mei 1906 dan dilantik pada 2 Juli 1906. Dengan demikian, tahun 1906 menjadi tahap penting dalam pengintegrasian Jambi ke dalam struktur administrasi Hindia Belanda. Kesultanan Jambi kemudian ditempatkan dalam struktur pemerintahan kolonial, sehingga kedaulatan yang sebelumnya dipertahankan oleh Sultan Thaha tidak lagi berada pada kesultanan.

Peristiwa 1904 dan 1906 menandai perubahan penting dalam hubungan Jambi dengan pemerintah kolonial. Sebelumnya, Belanda menghadapi perlawanan dari seorang sultan yang masih diakui oleh para pengikutnya. Setelah 1904, pemerintah kolonial dapat memperkuat pengawasannya melalui struktur keresidenan. Meskipun demikian, penguasaan kolonial tidak menghapus ingatan masyarakat terhadap Sultan Thaha, dan penetapannya sebagai Pahlawan Nasional pada 1977 memperlihatkan bahwa perjuangannya tetap diakui dalam sejarah Jambi dan Indonesia.

KESIMPULAN

Sultan Thaha Saifuddin merupakan tokoh penting dalam perlawanan Kesultanan Jambi terhadap perluasan kekuasaan kolonial Belanda. Penolakannya terhadap perjanjian yang memperkuat campur tangan Belanda mendorong terjadinya konflik terbuka pada 1858. Setelah pusat pemerintahan di Tanah Pilih dikuasai, Sultan Thaha melanjutkan pemerintahan dan perlawanan dari pedalaman hingga gugur pada 27 April 1904.

Pada saat yang sama, Belanda berusaha membangun legitimasi tandingan melalui pengangkatan sultan-sultan yang berada dalam struktur kekuasaan kolonial. Fenomena tersebut dikenal dalam sejarah Jambi sebagai "sultan bayang". Dengan demikian, konflik Jambi tidak hanya merupakan pertentangan militer, tetapi juga pertarungan mengenai kedaulatan dan legitimasi politik.

Setelah 1904, penguasaan kolonial semakin terkonsolidasi dan pada 1906 Jambi dibentuk sebagai keresidenan dalam administrasi Hindia Belanda. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, kajian lanjutan dengan arsip kolonial dan sumber lokal dapat memperjelas masa pemerintahan para sultan tandingan serta peran para pengikut Sultan Thaha di pedalaman.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, R., & Seprina, R. (2023). Perjuangan Sultan Thaha Syaifuddin terhadap Kolonial Belanda di Jambi (1858–1904): Study Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah. Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah, 2(2), 104–118. https://doi.org/10.22437/krinok.v2i2.25064

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. (2010). Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Jambi. Kementerian Pendidikan Nasional.

Lindayanti, dkk. (2013). Jambi dalam Sejarah 1500–1942. Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi.

Locher-Scholten, E. (2004). Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907. Southeast Asia Program Publications, Cornell University.

Masjkuri. (1985). Sultan Thaha Saifuddin. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Pemerintah Provinsi Jambi. (2026). Kesultanan Jambi, Jejak Kejayaan Islam di Bumi Melayu. Portal BPSDM Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi. (2026). Sejarah Jambi. Situs resmi Pemerintah Provinsi Jambi.

Rosyadi, R. U., & Pradjoko, D. (2023). Strategi Sultan Thaha Syaifuddin dalam Melawan Penetrasi Belanda di Kesultanan Jambi (1855–1904). Jurnal Ilmiah Dikdaya, 13(2), 595–608. https://doi.org/10.33087/dikdaya.v13i2.530

Saudagar, F. (2008). Sultan Thaha Saifuddin: Perang Tak Kenal Damai 1855–1904. Yayasan FORKKAT.

Wikisumber. (n.d.). Sultan Thaha Syaifuddin, Bab 2, Bab 4, dan Bab 6.

Yulita, O., & Nofra, D. (2019). Perlawanan Kesultanan Melayu Jambi terhadap Kolonial Belanda: Kasus Sultan Muhammad Fachruddin (1833–1844 M) dan Sultan Thaha Saifuddin (1855–1904 M). Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2(2), 73–85. https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i2.2068